

**THE ANALYSIS OF THE MODALITIES COMPARISON OF REGENT AND VICE
REGENT CANDIDATES IN SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTION 2017 IN
JEPARA**

Nadia Ajeng Triyanti
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Fax (024) 7465407
Laman : www.fisipundip.ac.id email fisip@undip.ac.id

Abstract

The victory of a pair supported by a single party over another pair supported by 9 parties in the regional election in Jepara district is the background of this research. The problem statement of this research is “How is the modalities comparison possessed by the regent and vice regent candidates in the regional election 2017 in Jepara district?”

The objectives of this research are to determine the modality possessed by the two pairs of regent and vice regent candidates in the simultaneous regional election 2017 in Jepara district and what modal becomes the victory factor from the pair having more votes.

The effort to answer the problems and the research objectives is done by using modality theory, consisting of political capital, social capital, and economic capital which were then analysed by using descriptive method. The regent and vice regent candidates also the supporting parties are the objects of this research.

The result of the research shows that the pair having more votes is Ahmad Marzuqi and Dian Kristiandi who have higher social capital compared to the other pairs and beat its competitor which is Subroto and Nur Yahman who have stronger political and economic capital.

It is suggested that each pair joining the political contest try harder to further utilize each capital among the three capitals possessed and accumulate them well. Because each capital is an important factor in determining the pair's victory.

Keywords: Pair, Regional Election, Modalities, Pair

PENDAHULUAN

Tahun 2017 merupakan periode ketiga dalam pemilihan kepala daerah langsung di Jepara. di periode ini diikuti oleh 2 pasang calon bupati dan wakil bupati, yaitu Ahmad Marzuqi - Dian Kristandi dan Subroto - Nur Yahman yang. Dimana kedua calon bupati tersebut merupakan petahana bupati dan wakil bupati pada periode sebelumnya. Kedua calon bupati dan calon wakil bupati tersebut diusung oleh partai politik, baik koalisi dan non koalisi. Ahmad Marzuqi - Dian Kristandi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanpa koalisi dengan partai manapun dan Subroto-Nur Yahman diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Nasional Demokrasi, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat.

Hasil rekapitulasi suara yang telah dirilis, menunjukkan bahwa pasangan no urut 2 yaitu Ahmad Marzuqi-Dian Kristandi memperoleh suara sebesar 51,25% dan pasangan no urut 2 memperoleh suara sebesar 48,75%. Persaingan dalam kontestasi politik ini sangat sengit, dan berujung pada kekalahan pasangan no urut 1 dan dimenangkan oleh

pasangan no urut 2 dengan selisih suara 15.581 suara atau 2,5% dari total suara. Namun, terdapat hal yang menarik dimana pasangan no urut 1 memenangkan perolehan suara di 9 kecamatan dan pasangan no urut 2 sebagai pemenang pilkada hanya menang di 7 kecamatan. Kekalahan Subroto-Nur Yahman merupakan kekalahan pertama PPP sebagai salah satu partai koalisi pengusung pasangan tersebut dalam pemilu di Kab. Jepara. PPP merupakan partai dengan basis massa besar di Jepara, dapat dilihat pula bahwa 2 periode pilkada sebelumnya memenangkan perolehan suara secara berturut-turut dan dalam pemilu legislatif pasca reformasi pun PPP selalu mendapat suara terbanyak.

Subroto dan Nur Yahman bukan lah tokoh baru dalam pilkada Kab Jepara, Subroto merupakan mantan wakil Bupati Kab. Jepara pada periode sebelumnya yang telah mengikuti pilkada pada tahun 2012 dan tahun 2017 ini, sedangkan Nur Yahman sudah mengikuti pilkada Kab. Jepara sejak 2007 hingga 2017 yang berarti sudah melalui 3 periode pilkada dengan partai pengusung yang berbeda pada setiap tahunnya. Kekalahan pada pilkada sebelumnya bukanlah penghambat untuk berjuang menjadi orang nomor 1 di Jepara.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis perbandingan

modalitas yang dimiliki antara kedua pasang calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada serentak tahun 2017 di Kab. Jepara, dengan judul penelitian “**Analisis perbandingan Modalitas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara**”.

Pemilukada merupakan proses demokrasi secara *procedural* dan *substansial* dengan cara memilih orang/figur dan kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Dalam demokrasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan sebagai kepala daerah dengan diberi kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetisi didalam penempatan jabatan-jabatan publik yang dipilih, tetapi di dalam tataran empiris, kesempatan itu sebenarnya berbeda antara satu dengan orang lain karena modal yang dimiliki setiap orang dalam kontestasi pemilukada secara langsung pada kenyataannya berbeda-beda.

Modalitas dalam pilkada memiliki peran penting, karena modal merupakan syarat inti untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Secara konseptual, tiga modal utama yang harus dimiliki calon kepala daerah adalah modal politik, modal sosial, modal ekonomi. Ketiga modal itu memang bisa berdiri sendiri-sendiri tanpa adanya keterkaitan

antara satu dengan yang lain. Tetapi diantara ketiganya sangat berkaitan antara satu dengan yang lain. Dengan maksud, calon kepala daerah memiliki peluang besar untuk terpilih saat pasangan calon mampu mengakumulasi ketiga modal tersebut.

Berikut 3 jenis modal utama yang harus dimiliki kandidat yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pemilukada langsung, modalitas tersebut adalah:

Modal Politik

Modal politik merupakan adanya dukungan politik, baik dari rakyat maupun dari kekuatan-kekuatan politik yang dipandang sebagai representasi dari rakyat, modal ini menjadi sentral bagi semua orang yang bermaksud mengikuti kontestasi di dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, baik dalam tahapan pencalonan maupun di dalam tahapan pemilihan. Jabatan politik, pengalaman mengorganisasi masa, keturunan (bangsawan atau penguasa), kekuatan terhadap pengambilan keputusan publik, reputasi dan legitimasi merupakan modal penting yang harus dimiliki kandidat untuk memperoleh modal politik dengan maksimal.

Kandidat dalam pemilukada memerlukan dukungan politik yang berupa dukungan dari partai politik serta koalisi partai . Partai politik adalah organisasi

politik yang mengajukan kandidat dalam pemilukada untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan dan kemudian dipilih oleh rakyat. Sedangkan Pemilu merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Kandidat akan berusaha sebanyak mungkin menggalang koalisi partai politik yang mendapatkan kursi dan suara di DPRD hasil pemilu legislatif, namun dukungan parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD juga tetap digalang. Pemilukada sebagai arena kompetisi antar kandidat. Fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil sehingga kandidat yang ingin memenangkan pilkada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi lebih menonjol terhadap pengaruh figur kandidat.

Kandidat yang ingin memenangkan pilkada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik. Selain organisasi-organisasi politik kandidat harus melakukan pendekatan dengan elit-elit politik yang menduduki jabatan politik dan jabatan-jabatan strategis yang mempunyai peran penting dan pengaruh terhadap

kelompok masyarakat. Pendekatan dengan elit politik perlu dilakukan sebagai modal politik dalam konteks lokal. Elit politik lokal adalah mereka yang memiliki jabatan politik di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Anggota DPRD, maupun pemimpin-pemimpin partai yang ada di tingkat daerah. Elit Non-Politik Lokal adalah orang-orang yang menduduki jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat, kepemudaan, profesi, dan lain sebagainya.

Modal Sosial

Latar belakang sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan.

Kepercayaan digunakan untuk memperoleh kedudukan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya atas dasar kepercayaan masyarakat. Jika kekuasaan dilanggar, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada pemegang

kekuasaan. Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan kemenangan pemilukada, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut. Pandangan para pakar dalam mendefinisikan modal sosial di bagi dalam dua kelompok. Pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial (*sosial network*), sedangkan kelompok kedua lebih menekankan pada karakteristik yang melekat (*embedded*) pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial.

Modal sosial memiliki makna yang sangat penting, bahkan tidak kalah penting dibandingkan dengan modal politik. Melalui modal sosial yang dimiliki, kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih. Namun, melalui pengenalan itu, lebih-lebih pengenalan yang secara fisik dan sosial berjarak dekat, para pemilih bisa melakukan penilaian apakah pasangan yang ada benar-benar layak untuk dipilih atau tidak. Manakala seseorang calon dikatakan memiliki modal sosial, berarti calon tersebut tidak hanya dikenal oleh masyarakat melainkan juga diberi kepercayaan.

Modal Ekonomi

Dalam pelaksanaan pemilukada setiap pasangan maupun koalisi partai politik pasti mempersiapkan modalitas ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit sebagai kampanye. Hal tersebut membuktikan bahwa modal ekonomi adalah modal dasar yang juga memiliki pengaruh penting terhadap pencalonan kepala daerah. Modal ekonomi dalam pemilukada dapat berupa kekayaan, kekuatan pengaruh dalam masyarakat di bidang ekonomi, birokrat pemerintahan. Modal yang besar itu tidak hanya dipakai untuk membiayai pelaksanaan kampanye. Modal tersebut juga digunakan untuk membangun relasi dengan para calon pendukungnya, termasuk didalamnya adalah modal untuk memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan berlangsungnya masa kampanye. Tidak jarang, modal tersebut juga ada yang secara langsung dipakai untuk memengaruhi pemilih.

Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai 'penggerak' dan 'pelumas' mesin politik yang dipakai. Di dalam musim kampanye, misalnya, membutuhkan uang yang cukup besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, mencetak spanduk, membayar iklan, mengangkut pendukung, dan berbagai kebutuhan lainnya. Bahkan modal ekonomi itu bisa menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang

mencalonkannya. Modal ekonomi seperti ini dipakai sebagai pelumas untuk meloloskan seseorang dalam pencalonan, di samping sebagai pelumas untuk menjalankan organ-organ partai yang ada dibawah.

Konsepsi Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor dari dalam (Strength dan Weakness) serta luar (Opportunities dan Threats). Kata-kata tersebut dapat dipakai dalam usaha ataupun strategi politik untuk penyusunan suatu rencana supaya lebih matang dalam mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Teori SWOT berfungsi untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu mengetahui faktor penentu dalam suatu kejadian.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan arsip atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan melakukan telaah dokumen.

HASIL PENELITIAN

Hasil analisis perbandingan modalitas pasangan bupati dan wakil bupati pada pilkada serentak tahun 2017 di Jepara adalah sebagai berikut

Perbandingan modal politik yang dimiliki kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pasangan Subroto – Nur Yahman memiliki modal politik yang lebih kuat dibanding pasangan Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi, terlihat dari jumlah partai pengusung yang sangat timpang, yaitu 9 partai lawan 1 partai. Karena partai politik merupakan kendaraan yang harus dimiliki dan di kendarai oleh pasangan calon untuk mengikuti dan memenangkan kontestasi

politik. Semakin banyak partai yang mendukung, akan semakin mudah untuk menarik banyak masa untuk memilihnya. Dengan didukung 9 partai, berarti sebagian besar elit politik Jepara pun lebih mendukung pasangan Subroto – Nur Yahman. Selain dukungan dari elit politik lokal, pasangan Subroto – Nur Yahman juga lebih memiliki dukungan jaringan politik yang lebih luas dari luar daerah hingga tingkat nasional. Partai PPP yang merupakan basis masa di Jepara mendukung pasangan Subroto – Nur Yahman, hal tersebut menjadi kekuatan tambahan bagi pasangan tersebut, dan menjadi ancaman bagi pasangan Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi.

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan modal sosial yang dimiliki kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam hal modal sosial, pasangan Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi memiliki modal yang lebih kuat dibandingkan dengan pasangan lawan.

Perbandingan modal ekonomi yang dimiliki kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam kepemilikan modal ekonomi, pasangan Subroto – Nur Yahman lebih unggul dibandingkan lawannya. Harta kekayaan yang dimiliki dan dana kampanye yang dikeluarkan pun terpaut cukup jauh antara pasangan Subroto – Nur Yahman dengan pasangan Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi.

PEMBAHASAN

Modal Politik

Perbandingan modal politik yang dimiliki kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pasangan Subroto – Nur Yahman memiliki modal politik yang lebih kuat dibanding pasangan Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi, terlihat dari jumlah partai pengusung yang sangat timpang, yaitu 9 partai lawan 1 partai. Karena partai politik merupakan kendaraan yang harus dimiliki

dan di kendarai oleh pasangan calon untuk mengikuti dan memenangkan kontestasi politik. Semakin banyak partai yang mendukung, akan semakin mudah untuk menarik banyak masa untuk memilihnya. Dengan didukung 9 partai, berarti sebagian besar elit politik Jepara pun lebih mendukung pasangan Subroto – Nur Yahman. Selain dukungan dari elit politik lokal, pasangan Subroto – Nur Yahman juga lebih memiliki dukungan jaringan politik yang lebih luas dari luar daerah hingga tingkat nasional. Partai PPP yang merupakan basis masa di Jepara mendukung pasangan Subroto – Nur Yahman, hal tersebut menjadi kekuatan tambahan bagi pasangan tersebut, dan menjadi ancaman bagi pasangan Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi.

Modal Politik yang dimiliki pasangan Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi ini lebih dominan pada jabatan politis yang pernah diduduki, yaitu Ahmad Marzuqi yang pernah menjabat sebagai wakil bupati dan bupati Kabupaten Jepara,

dan Dian Kristiandi yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Jepara dan Ketua DPC PDI-P Jepara.

Modal Sosial

Perbandingan modal sosial yang dimiliki kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam hal modal sosial, pasangan Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi memiliki modal yang lebih kuat dibandingkan dengan pasangan lawan. Karena Ahmad Marzuqi dan Dian Kristiandi merupakan putra daerah asli Jepara, dan lawannya yaitu Subroto bukan merupakan putra daerah. Selain itu, Ahmad Marzuqi merupakan Kyai yang dianggap memiliki pengetahuan yang baik tentang agama, dimana sebagian besar masyarakat Jepara masih merupakan pemilih psikologis, yang memiliki pikiran bahwa pemimpin yang memiliki pengetahuan lebih tentang agama merupakan pemimpin yang baik dan patut dipilih. Menjadi keuntungan juga Ahmad Marzuqi merupakan Kyai NU, karena mayoritas

masyarakat Jepara sebagai pengikut atau dekat dengan organisasi NU. Sebagai kyai, Ahmad Marzuqi dikenal sebagai pribadi yang santun dan sederhana. Hal tersebut yang menjadikan popularitas Ahmad Marzuqi lebih tinggi dibanding lawannya.

Modal Ekonomi

Perbandingan modal ekonomi yang dimiliki kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam kepemilikan modal ekonomi, pasangan Subroto – Nur Yahman lebih unggul dibandingkan lawannya. Harta kekayaan yang dimiliki dan dana kampanye yang dikeluarkan pun terpaut cukup jauh antara pasangan Subroto – Nur Yahman dengan pasangan Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi. Dengan dana kampanye yang besar ini menimbulkan isu *money politics* yang santer terdengar, dalam kaitan ini adalah pembelian surat rekomendasi dari partai – partai pengusung, karena sangat fantastis apabila 9 partai bisa mendukung satu calon tanpa ada embel-embel apapun.

Selain itu, sudah menjadi rahasia umum juga apabila kedua calon tersebut masih melakukan “serangan fajar”. Nominal dan sebarannya lebih besar pasangan Subroto – Nur Yahman dibanding pasangan lawannya, hal ini didapati penulis dari kabar yang beredar, dan kerabat yang menerima langsung “serangan fajar” tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan mengenai Analisis Perbandingan Modalitas Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Serentak tahun 2017 di Kabupaten Jepara bahwa modalitas yang dimiliki Pasangan Subroto – Nur Yahman lebih dominan dalam modal politik dan ekonomi yang dimilikinya. Sedangkan, pasangan Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi lebih unggul dalam modal sosial yang dimilikinya. Faktor utama yang membuat pasangan Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi adalah keunggulan modal sosial yang dimilikinya.

Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat Jepara lebih memilih calon kepala daerah berdasarkan kedekatan psikologis terhadap kandidat. Dan masyarakat Jepara masih menaruh kepercayaan terhadap bupati petahana.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang di dapat, maka penulis berusaha memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebelum mencalonkan diri atau memilih pasangan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah, khususnya dalam hal ini bupati, alangkah baiknya melakukan analisis mengenai faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dimiliki dalam masing-masing calon pasangan itu sendiri.
2. Untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati dibutuhkan akumulasi modalitas yang kuat. Tidak melulu tentang kekuatan politik dan

ekonomi, yang harus diperhatikan lebih adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap kandidat.

3. Partai politik di Jepara harus lebih memperhatikan pola regenerasi dan kaderisasi yang lebih terbuka dalam seleksi pencalonan kepala daerah, agar muncul bibit-bibit pemimpin baru. Karena kedua pasangan calon pada pilkada tahun 2017 merupakan *orang lama* dalam dunia politik Jepara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiarjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Cengara, Hafid. 2009. *Komunikasi Politik (Konsep, Teori dan Strategi)*. Jakarta. PT. Grafindo Persada.
- Dahl, Robert A. 1992. *Demokrasi dan Para Pengikutnya*. Yayasan Obor Indonesia.

Firmanzah. 2007. *Marketing Politik antara Pemahaman dan Realitas*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Gaffar, Affan. 1999. *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marijan, Kacung. 2012. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Mujani, Saiful., R. William Liddle, Kuskrido Ambardi. 2011. *Kuasa Rakyat*. Bandung: Mizan Publika.

Suharizal. 2012. *Pemilukada (Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Moleong, J. Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Jurnal

Hoesein, Zainal Arifin. 2010. *Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi*. Jurnal Konstitusi Vol. 7 No 6. (diakses pada 20 April 2017)

Syakra, Rusydi. 2003. *Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi*. Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 5 No. 1. (diakses pada 9 Juni 2018)

Jurnal

Website

https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/jawa_tengah/jepera (diakses pada 15 Maret 2017)

<http://www.kpujepera.go.id> (diakses pada 15 Maret 2017)

<https://jeparakab.bps.go.id> (diakses pada 1 Mei 2018)

<https://www.kompasiana.com/jepera/pilbu-p-jepera-2017-dilema-warga> (diakses pada 8 Juni 2018)

<http://mediaindonesia.com/read/detail/74424-kiai-jepera-hanya-restui-paslon-subroto-dan-nur-yahman> (diakses pada 8 Juni 2018)